



Perspektif Kearifan Lokal dalam Tata Kelola dan Penyelesaian Konflik Keagamaan di Madura; Sebuah Tinjauan Sosiologi

Abd Hannan¹, Zainuddin Syarif²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Madura

Article history:

Submission : 20-10- 2023

Accepted : 08-11- 2023

Published : 21-12-2023

Author's email:

hannan.taufiqi@gmail.com
doktorzainuddinsyarif@gmail.com

Abstract

This study examines strategies for managing and resolving religious conflicts in Madura through the use of local wisdom of the local community. This research is a field study conducted based on the type of qualitative research. There are two data used in this research, primary data and secondary data. After using field data analysis based on sociological theory, in this case Galtung's conflict theory, this study found that the use of local wisdom in efforts to mitigate and resolve religious conflicts in Madura is by utilizing and prioritizing local community religious leaders. In the context of Madurese society, the single most charismatic, influential and well-respected local religious figure among Madurese people is the kyai. In general, the influence and charisma of kyai in Madura is obtained because he (kyai) has sufficient and complete social capital, this social capital includes power, knowledge and ideology. Armed with these three social capitals, kyai can position themselves as intermediaries or mediators, carrying out conflict intervention functions so that the process and efforts to handle religious conflicts in Madura are optimal and good

Kata kunci: konflik agama, Madura, sosiologi, kearifan lokal, kyai

Pendahuluan

Diskursus seputar sosial keagamaan masyarakat Madura senantiasa mengundang perhatian dan ketertarikan publik dari waktu ke waktu. Meski selama ini kajian tentangnya sudah banyak dilakukan dan bermunculan, bahkan dengan ragam perspektif dan sudut pandang keilmuan beraneka ragam, namun hingga kini kajian tentang sosial keagamaan masyarakat tentang penting dan menarik dilakukan (Kuntowijoyo, 2002, 1850–1940). Tergolong penting, karena sebagaimana kita ketahui bersama, Madura adalah wilayah geografis dengan tipologi sosial keagamaan cukup kental. Secara umum, kentalnya nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat Madura dapat dilacak dari besarnya pengakuan

dan penghormatan mereka terhadap simbol-simbol keagamaan (De Jonge 1989). Dalam kaitan ini, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur keagamaan lokal yang selama ini cukup melekat dalam tradisi dan kultur sosial masyarakat Madura, meliputi lembaga pesantren, organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), dan terakhir adalah eksistensi atau figuritas kyai (Tik 1990).

Adapun terbilang menarik, karena dalam kenyataannya, hal-hal berkenaan dengan isu-isu keagamaan kerap menimbulkan perdebatan dan polemik hangat di ranah publik. Bahkan, di banyak kesempatan, perdebatan dan polemik tersebut seringkali mengerucut menjadi pertentangan sosial di tengah masyarakat yang mengarah terhadap adanya konflik hingga benturan fisik di akar rumput (A'la, Mukarrom, and Zamzami 2018). Bercermin dari banyak peristiwa yang ada, sejauh ini terdapat banyak kasus konflik sosial di Madura yang motifnya berasal dari isu-isu keagamaan. Satu di antaranya yang paling mengundang perhatian dan sorotan publik adalah konflik Sunni-Syiah Sampang pada tahun 2011 dan 2012. Tentu, konflik Sunni-Syiah di Sampang bukan satu-satunya kasus konflik keagamaan di Madura. Ada banyak rentetan kasus konflik bermotif keagamaan lain yang tidak kalah krusialnya, sebuah saja kasus penutupan paksa Masjid Wahabi di Pamekasan, pembubaran paksa pengajian Hanan Attaki di Pamekasan, pembakaran kantor MWCNU Lenteng di Sumenep, dan masih terdapat sejumlah konflik keagamaan lainnya (Kartika 2023; Rahman 2023). Selain konflik di level internal muslim, juga terdapat konflik keagamaan antar agama meskipun tergolong jarang, satu di antaranya adalah konflik penolakan Pembangunan gereja di Sampang.

Pada level akademis, sejauh ini ada banyak kajian terdahulu yang di dalamnya mengupas mendalam isu-isu konflik keagamaan di Madura. Beberapa di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Afdillah (2016), *Dari Masjid ke Panggung Politik; Melacak Akar-akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dirinya mendapati temuan bahwasanya konflik keagamaan di Madura sesungguhnya tidak terjadi secara spontan. Kasus keagamaan di Madura memuat rangkaian cukup panjang. Seringnya ketegangan dan pertentangan antara dua komunitas mengalami eskalasi dan kian besar karena dibumbui oleh letupan-letupan faktor eksternal di luar keagamaan yang bersifat politis. Kecenderungan semacam inilah yang dapat ditemukan pada sejumlah kasus atau konflik keagamaan di Madura. Paling mencolok dan kentara dapat ditemukan secara terang benderang pada adalah kasus konflik Sunni-Syiah Sampang (Afdillah 2016). Tesis ini juga dipertegas oleh sejumlah penelitian lainnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ahmad Zainal Abidin (2018), *Between Conflict and Peace: The Government Policies and Sunni-Shia Relationship in Sampang and Yogyakarta* (Abidin 2018); Muhammad Wakhid Mustofa (2021), *A Solution to the Sunni and Shia Conflict in Sampang Madura Using a Dynamic Game Theory* (Musthofa and Yusup 2021).

Berbeda dari studi sebelumnya, sebagaimana penelitian di atas yang lebih condong memfokuskan pembacaannya pada aspek politik dalam menelusuri dan menggali faktor penyebab konflik, penelitian ini memosisikan dirinya dari perspektif berbeda, dalam hal ini adalah strategi dalam melakukan tata kelola dan manajemen konflik keagamaan. Konkretnya, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana menyuguhkan cara penanganan dan penyelesaian konflik yang baik dan efektif dengan cara memanfaatkan dan menggunakan kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal dimaksud adalah nilai-nilai keagamaan daerah atau lokalitas yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem dan struktur sosial keagamaan masyarakat Madura. Ini bisa dilacak dan ditemukan dalam tradisi dan sistem sosial kehidupan mereka sehari-hari yang cukup identik dan dekat dengan nilai-nilai keagamaan Islam (Izzati 2020). Secara umum, pembahasan dalam kajian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: *pertama*, bagaimana dinamika penanganan dan penyelesaian konflik keagamaan di Madura? Apa yang disebut kearifan lokal dalam tata kelola konflik keagamaan di Madura? Bagaimana tata kelola penyelesaian konflik keagamaan di Madura ditinjau dari perspektif sosiologi?

Adapun untuk urgensinya, signifikansi penelitian ini didasarkan pada sejumlah argumentasi. *Pertama*, jika mengacu pada banyak peristiwa konflik sosial keagamaan yang terjadi Madura dalam satu dekade terakhir terutama pasca meletusnya konflik berdarah antara Sunni-Syiah di Sampang Madura, masih tingginya kasus konflik keagamaan di Madura merupakan indikasi atau bukti nyata atas tidak maksimalnya tata kelola konflik sosial keagamaan yang telah dilakukan selama ini. Karenanya, perlu strategi khusus bagaimana menjalankan proses tata kelola dan penanganan konflik, yang memungkinkan dapat menyuguhkan proses dan hasil lebih maksimal, lebih baik dan jauh lebih efektif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan unsur kearifan lokal agama masyarakat setempat, dalam hal ini adalah eksistensi dan figuritas kyai (Nasrullah 2019; Zainuddin dan Hanan 2020). *Kedua*, menyebut dan menggolongkan kyai ke dalam konsep kearifan lokal agama di Madura didasarkan pada fakta bahwa kyai merupakan tokoh elit agama besar dan berpengaruh di Madura. Kyai memiliki modal sosial cukup lengkap dan kuat untuk melakukan fungsi dan kontrol sosial berupa intervensi konflik.

Secara umum, kontrol sosial tersebut mencakup tiga aspek, yakni aspek kekuasaan, aspek pengetahuan, dan aspek ideologi (Hannan dan Abdillah 2019).

Metode

Secara metodologi, studi ini merupakan kajian lapangan yang menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, data primer yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara mendalam peneliti bersama informan, serta informasi atau berita yang diperoleh dari media baik cetak maupun online yang terbit pada periode 2015-2023. Selain itu, juga ada data sekunder berupa data-data kepustakaan dari sumber-sumber literatur terdahulu yang objek pembahasannya memiliki keterikatan kuat dengan masalah utama penelitian ini. Sumber literatur dalam kajian ini peneliti batasi pada hasil penelitian yang terbit kisaran tahun 2015-2023, baik hasil penelitian yang berbentuk kegiatan kajian lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun kriteria sumber literatur yang dijadikan sumber tulisan ini adalah laporan penelitian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau sejumlah lembaga penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, buku maupun prosiding.

Adapun untuk teknik analisa data lapangan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data lapangan Miles dan Huberman, di mana menurut keduanya, teknik analisis data lapangan dalam kualitatif dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, reduksi data. Data lapangan terkait konflik keagamaan di Madura disederhanakan ke dalam beberapa kategorisasi khusus, dalam hal ini konflik keagamaan di level internal muslim dan konflik antarumat beragama. *Kedua*, yaitu penyajian data atau *display data*, di mana pada aktivitas penelitian ini proses penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan semua data lapangan yang diperoleh Peneliti selama ada di lapangan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan. Simpulan yang diperoleh dalam penelitian adalah nilai kearifan lokal paling signifikan dalam upaya melakukan mitigasi dan penyelesaian konflik keagamaan di Madura ditinjau dari perspektif sosiologi, yaitu nilai kearifan lokal yang merujuk terhadap elit keagamaan masyarakat setempat. Dalam konteks ini merujuk pada figur atau ketokohan seorang kyai selaku tokoh kharismatik dan berpengaruh di Madura.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Kasus Konflik Keagamaan di Madura

Berdasarkan jenisnya, konflik keagamaan di Madura dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik keagamaan di level internal umat Islam dan konflik keagamaan yang antarumat

beragama. Masuk dalam jenis konflik keagamaan pertama, yaitu konflik Sunni-Syiah di Sampang, penutupan masjid Wahabi di Pamekasan, pembubaran paksa pengajian Hanan Attaki, tuduhan penistaan agama terhadap Kyai Fathor, penolakan terhadap Gus Imad di Pamekasan, pencegahan terhadap Kyai Makruf Amin di Pamekasan. Adapun pada jenis konflik kedua, konflik ini relatif minim di Madura, berdasarkan penelusuran data lapangan jenis konflik pernah terjadi di Kabupaten Sampang, tepatnya adalah rumah ibadah milik Gereja Persekutuan Injil Indonesia (GPII), di desa Ketapang Degeh, Kabupaten Sampang, Madura.

a) Penolakan Gereja di Sampang

Selain pelanggaran kebebasan beragama di lingkaran internal Islam, sebagaimana diuraikan pada sub-sub pembahasan sebelumnya, kasus penyempitan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Madura juga terjadi di level antaragama. Satu di antara kasus yang berhasil terungkap ke permukaan publik dan media adalah pelanggaran kebebasan beragama terhadap kaum kristiani, dalam hal ini adalah penolakan rumah ibadah milik Gereja Persekutuan Injil Indonesia (GPII), di desa Ketapang Degeh, Kabupaten Sampang, Madura. Peristiwa ini meledak pada tahun 2012, namun berdasarkan kronologinya gejala ke arah sana sesungguhnya telah mulai muncul sejak tahun 2008. Hal ini bermula ketika seorang pendeta bernama Buas Sadono menginisiasi pembangunan gereja, yang kala itu tujuannya untuk memfasilitasi penganut agama kristiani yang ada sekitar daerah setempat, yang berjumlah sedikitnya 30 orang.

Mulanya, masyarakat sekitar tidak permasalahan pendirian tersebut, hanya saja setelah dilakukan penelusuran kegiatan pembangunan gereja tersebut belum resmi terdaftar di kementerian agama. Mengetahui persoalan tersebut, masyarakat melalui organisasi Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) melakukan aksi, menolak dan mengancam membakarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, massa menuntut agar tempat ibadah tidak berizin tersebut dibekukan oleh pemerintah. Selain telah membuat resah masyarakat sekitar yang mayoritas adalah Muslim karena pembangunan fisiknya yang semakin besar dan megah, juga karena pendirian tempat ibadah tersebut tidak melalui pemberitahuan dan perizinan kementerian agama daerah setempat, yakni pihak Kemenag Kabupaten Sampang. Terkait ini, berdasarkan penelusuran data lapangan di Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Sampang, tidak ada satu pun nama gereja kristiani dalam daftar tempat ibadah umum di Kabupaten Sampang baik Kristen Protestan maupun Katolik, tidak terkecuali di Kecamatan Ketapang.

b) *Konflik Sunni-Syiah di Sampang*

Konflik antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah di Sampang Madura terjadi pada tahun 2012, konflik ini ditandai oleh aksi penolakan masyarakat setempat terhadap keberadaan Syiah di Sampang, yang kemudian diikuti oleh aksi intimidasi, teror, dan perusakan (Hamdi 2014). Berdasarkan kronologinya, konflik berdarah antara Sunni dan Syiah di Sampang memiliki rangkaian peristiwa cukup panjang, gejala ke arah sana sesungguhnya telah mulai terlihat sejak tahun 1998, tepatnya ketika dakwah Ustaz Tajul Muluk selaku pimpinan Syiah memperoleh sambutan hangat dari masyarakat dan membuat jumlah pengikut Syiah di Sampang dari tahun ke tahunnya semakin banyak (Ida and Dyson 2015). Menurut hasil investigasi lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), hubungan disharmoni Sunni-Syiah Sampang di Madura mulai mengarah ke konflik fisik dan terbuka pada tahun 2004, yang kala itu ditandai oleh aksi teror dan intimidasi terhadap ustaz Tajul Muluk selaku pimpinan Syiah setempat, warga Syiah, rumah Tajul Muluk, dan juga pesantren Misbahul Huda miliknya. Teror dan intimidasi tersebut berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, tahun 2006, tahun 2009, tahun 2011, dan mencapai puncaknya di tahun 2012 (KONTRAS Surabaya 2012).

Konflik antara Muslim Sunni dan Syiah di Sampang-Madura barangkali merupakan preseden teramat buruk dalam sejarah kehidupan beragama di Madura, terutama dalam diskursus kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasalnya, pada peristiwa ini terjadi ragam perlakuan dan tindakan negatif terhadap muslim Syiah Madura, yang notabene merupakan kelompok minoritas di Madura. Tindakan negatif tersebut meliputi intimidasi, teror, pengusiran hingga tindakan koersi berupa pemaksaan terhadap mereka agar menanggalkan pemahaman atau ajaran Syiah, beralih menjadi pengikut ajaran Sunni, sebagaimana muslim di Madura pada umumnya (2012). Akibat peristiwa berdarah ini, satu warga Syiah meninggal di tempat setelah terkena sabetan alat tajam, puluhan tempat tinggal Muslim Syiah di Sampang hangus dibakar massa, pun demikian juga tempat ibadah dan pesantren yang menjadi pusat kegiatan pendidikan dan keagamaan mereka sehari-hari. Tidak cukup sampai di situ, sejak konflik ini meledak pada tahun 2011, Muslim Syiah Sampang harus keluar dari kampung halaman, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka karena penolakan dan ancaman dari warga sekitar. Pada tahun 2013, setelah dua tahun lamanya tinggal di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Sampang, warga Syiah Sampang kemudian direlokasi ke Sidoarjo. Pada tahun 2021, sejumlah Muslim Syiah

Sampang memperoleh izin kembali ke kampung halaman mereka setelah ada kesediaan diri dari mereka untuk melakukan baiat diri, keluar dari ajaran Syiah dan masuk ke dalam ajaran Sunni (Rachman 2012).

c) Ustadz Yasir dan Penutupan Paksa Masjid

Selang satu bulan kasus aksi pembubaran paksa pengajian Hanan Attaki di Pamekasan, kasus dengan motif serupa kembali terjadi di Pamekasan. Hanya bedanya, kali ini lebih kepada aksi penutupan paksa tempat ibadah umum, yakni masjid muslim Wahabi di Pamekasan (Agency 2023). Berdasarkan penggalan data lapangan, kasus ini bermula atas dugaan adanya pencemaran baik terhadap tokoh besar sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai H. Hasyim Asy'ari, yang dilakukan oleh seorang tokoh agama beraliran salaf, ustadz Yasir Hasan. Dalam sebuah kegiatan majelis keagamaan di sebuah masjid yang ditayangkan secara langsung lewat jejaring internet (*streaming*) di kanal media sosial, *Youtube*. Dalam paparannya, ustaz Yasir menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam di Pamekasan adalah *bid'ah* dan pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari menurut sang ustaz tidak memperbolehkan kegiatan tersebut. Pernyataan keagamaan tersebut sontak viral dan mengundang pro-kontra di tengah masyarakat, tidak hanya protes namun juga menuai aksi massa (Efendi 2023).

Puncaknya adalah terjadi mobilisasi dan gerakan massa besar-besaran, khususnya dari masyarakat Nahdliyin (sebutan bagi pengikut NU) Pamekasan. Mereka menuntut agar Ustaz Yasir meminta maaf secara terbuka, dan mendorong aparat kepolisian agar secepatnya memproses secara hukum karena menilai pelaku telah melakukan kebencian dan penodaan. Tidak cukup sampai di situ, bersamaan dengan aksi tersebut, masyarakat juga menutup paksa mesjid salaf yang menjadi tempat kegiatan keagamaan mereka sehari-hari (Kartika 2023). Menariknya, dalam aksi penutupan masjid ini, turut juga kepala desa, bahkan beberapa jam sebelum aksi berlangsung, aparat desa setempat lebih dulu turun ke lapangan, memerintahkan agar masjid steril dari segala bentuk kegiatan keagamaan. Untuk memastikannya, aparat desa setempat melucuti semua fasilitas seperti listrik dan pengeras suara, dan memblokir semua pintu masuk masjid sehingga kegiatan keagamaan tidak bisa lagi berfungsi dan berjalan sebagaimana biasanya (Ferdian 2023). Meski akhirnya Ustaz Yasir melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka, namun hingga sampai tulisan ini dibuat proses hukum terhadap dirinya tetap berjalan.

Figur Kyai sebagai Salah Satu Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Madura

Berdasarkan uraian teoritis di atas, terdapat sejumlah pertanyaan besar yang perlu diajukan dalam sub pembahasan ini, yaitu: Apa yang dimaksud dengan konsep kearifan lokal dalam penelitian ini? Kemudian, dalam kerangka berpikir bagaimana nilai kearifan lokal dapat memainkan peran dan fungsi strategis dalam proses penyelesaian konflik keagamaan di Madura? Dua pertanyaan ini penting dijawab dalam rangka memberi pemahaman dan penjelasan komprehensif terkait pokok permasalahan penelitian yang diangkat dalam kajian ini.

Pada pertanyaan pertama, konsep kearifan lokal sendiri merupakan istilah umum di Indonesia. lazimnya, konsep ini seringkali muncul dalam diskursus kebudayaan, ekonomi, dan paling dominan adalah pembangunan dan industrialisasi pariwisata. Secara etimologi, konsep kearifan lokal dapat kita ketahui makna dan pengertiannya dengan terlebih dahulu menelisik suku katanya, di mana istilah kearifan lokal sendiri terbentuk dari dua kata, kearifan dan lokal. Kearifan berasal dari akar kata 'arif' yang berarti bijaksana; cerdas, pandai, dan berilmu. Sementara kata lokal memuat pengertian setempat, terjadi di satu tempat saja, dan tidak merata (Njatrijani 2018). Jika berdasarkan pembacaan tersebut, kearifan lokal mengandaikan arti pada nilai, kreativitas, dan pandangan yang mengandung unsur kebijaksanaan yang menjadi ciri khas dan berlaku khusus di daerah tertentu. Dengan demikian, terminologi pendidikan kearifan lokal pesantren berarti merujuk pada konstruksi sosial pendidikan mereka yang di dalamnya mengandung unsur-unsur lokalitas dan kedaerahan, baik menyangkut sistem pembelajaran maupun materi ajaran atau kurikulumnya.

Adapun dari perspektif terminologinya, istilah kearifan lokal sesungguhnya memuat sejumlah pengertian. Salah satu pengertian yang paling jamak dimunculkan adalah kearifan mengacu pada berbagai kekayaan alam-sosial yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dipercaya dan diakui sebagai bagian penting yang mampu memperkuat kohesi sosial di antara warga masyarakat (Daniah 2016). Dari pengertian ini, terdapat sejumlah kata kunci penting, yaitu kekayaan alam-sosial, tumbuh berkembang dalam masyarakat, dan terakhir adalah kohesi sosial. Sebagai kekayaan alam sosial, kearifan lokal tidak melulu tentang sumber daya alam fisik, namun juga dapat berupa produk kreativitas sosial masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan. Tumbuh berkembang itu artinya keberadaannya tidak diekspor atau didatangkan dari luar, melainkan murni lahir dari realitas masyarakat setempat. Adapun sebagai kohesi sosial, itu mengisyaratkan bahwasanya kearifan lokal memiliki nilai fundamental membentuk dan memperkuat

hubungan sosial dan integrasi masyarakat setempat. Mengacu pada tiga kunci ini, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan kearifan lokal pesantren berarti sebuah sistem pendidikan yang memang murni berasal dan tumbuh berkembang di lingkungan masyarakat setempat, produk kebudayaan daerah, dan memiliki perangkat nilai yang berfungsi khusus memperkuat integrasi sosial masyarakat Madura secara menyeluruh.

Kearifan lokal juga bisa dipahami sebagai sistem pengetahuan, gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah tertentu (Afiqoh, Atmaja, and Saraswati, n.d.). Dengan kompleksitas nilai tersebut, pada batasan-batasan tertentu kearifan lokal mempunyai kegunaan atau fungsi khusus untuk menjawab sejumlah persoalan di tengah masyarakat. Berkaitan dengan fungsinya, Sirtha (dalam Sartini 2004) menyebutkan bahwa kearifan lokal yang terdiri dari kebudayaan, tradisi, pengetahuan, kreasi, dan seperangkat nilai-nilai lokal lainnya memiliki empat (4) fungsi penting; 1) Konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2) Mengembangkan sumber daya manusia; 3) Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4) Petuah, kepercayaan, sastra, dan pandangan hidup (Sartini, 2004).

Dengan mempertimbangkan keempat fungsi tersebut, khususnya fungsi pengembangan kebudayaan, petuah, dan kepercayaan, sesungguhnya dapat dipergunakan sebagai instrumen pembangunan dan penguatan sistem sosial di segala aspek, baik aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek politik, lebih-lebih di aspek keagamaan. Dalam hal keagamaan, di tengah masifnya konflik bermotif keagamaan di sejumlah daerah di Madura, nilai dan struktur keagamaan berbasis kearifan lokal dapat diproyeksikan sebagai instrumen khusus guna menangani dan menyelesaikan dinamika konflik keagamaan di Madura. Nilai dan struktur keagamaan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah konstruksi keislaman yang selama ini berlaku umum dan populer di Madura. Beberapa di antaranya ada nilai figuritas kyai dan keberadaan lembaga pesantren. Dalam kaitan ini, diakui atau tidak, kyai dan pesantren sebagai struktur tradisional keagamaan Islam di Madura, keduanya merupakan wujud nyata kearifan lokal Madura yang selama ini memiliki peran dan fungsi sentral menjaga stabilitas sosial Masyarakat Madura secara menyeluruh.

Analisis Sosiologi Peran Kearifan Lokal dalam penyelesaian Konflik Keagamaan di Madura

Bagaimana memahami kedudukan atau keberadaan kyai sebagai instrumen strategis penanganan dan tata Kelola konflik keagamaan di Madura secara praktik, dalam arti kontekstual? Mudah saja menjawabnya, karena sebagaimana diketahui bersama, masyarakat Madura mempunyai karakter sosiologis terkenal dengan dimensi religiusitas

diri cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan dari kehidupan sosial mereka sehari-hari, salah satunya tercermin jelas dalam sikap dan perilaku sosial yang sangat menghormati dan memuliakan kyai. Bagi kebanyakan masyarakat Madura, figur kyai adalah referensi kebenaran sekaligus pembenaran berbagai permasalahan sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial keagamaan. Sebagai referensi kebenaran, kyai dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama kerap menjadi tempat masyarakat belajar, bertanya, dan mencari tahu jawaban permasalahan sosial keagamaan tertentu (Rozaki 2004). Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan kyai juga kerap memainkan peran selaku aktor sentral yang dipercaya masyarakat menjadi penengah ketika terjadi perselisihan atau permasalahan tertentu. Itulah sebabnya, dalam konteks kehidupan masyarakat Madura, meskipun terminologi kyai kental dengan makna figur atau tokoh Islam, namun dalam kenyataannya kyai sesungguhnya dapat memainkan peran lintas sosial. Adapun sebagai pembenaran, eksistensi dan kedudukan kyai dapat menjadi legitimasi diperolehnya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang terbentuk antara kelompok atau kubu berkonflik. Dalam arti lain, setiap ucapan, perkataan, dan statemen kyai yang diarahkan untuk membangun stabilitas sosial, itu dapat menjadi instrumen dibangunnya perdamaian dan menekan konflik keagamaan di tengah masyarakat (Salam 2015).

Bercermin pada kedudukan dan kapasitas dirinya tersebut, kiranya cukup logis dikatakan jika eksistensi kyai ditinjau dari peran dan statusnya sebagai salah satu wujud kearifan lokal di Madura, pada batasan-batasan tertentu dirinya dapat menjalankan fungsi sebagai pihak ketiga dalam upaya meleraikan dan menengahi ragam konflik keagamaan di Madura. Atas dasar kenyataan ini kiranya cukup logis jika Clifford Geertz (1926-2006) dalam bukunya, , mengidentifikasi keberadaan kyai sebagai representasi nyata tokoh elit lokal Madura yang berperan sebagai *cultural broker* (Geertz, 1960). Artinya, bahwa kyai dengan segala kharisma dan nama besarnya memerankan peran sentral melakukan produksi dan reproduksi nilai-nilai sosial keagamaan, dirinya menjadi penyangga dan perekat sistem sosial masyarakat Madura sehingga struktur dan sistem sosial masyarakat Madura sebagai satu kesatuan pranata sosial dapat terjaga dan terpelihara. Ini sekaligus menjadi variabel penjelasan mengapa dalam banyak kesempatan, proses dan dinamika perubahan sosial masyarakat Madura dari waktu ke waktu tidak dapat dikecualikan dan dilepaskan dari keberadaan kyai, baik perubahan sosial di level kebudayaan, ekonomi, politik, terlebih lagi dalam dimensi sosial keagamaan. Pada level akademis, terdapat banyak kajian yang mempertegas kedudukan dan fungsi strategis kyai tersebut, salah satunya

adalah kajian yang dilakukan oleh Abdul A'la (2020), *Power-Knowledge Relations of the Elder and the Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura* (A'la and Mukarrom 2020).

Jika dikaji menggunakan teori besar Michel Foucault (1926-1984) tentang genealogi kekuasaan dan pengetahuan, sebagaimana tercantum jelas dalam salah satu buku fenomenalnya, *The Archaeology of Knowledge* (1926), sekurang-kurangnya ada tiga modal sosial besar mengapa keberadaan atau eksistensi kyai memiliki daya pengaruh signifikan dalam bangunan sistem sosial masyarakat Madura secara menyeluruh (Foucault 1961). Ketiga modal sosial tersebut adalah unsur kekuasaan, ideologi, dan pengetahuan. Kekuasaan dalam pandangan klasik dipahami sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sehingga dengannya orang lain dapat tunduk dan patuh terhadap dirinya. Konsep kekuasaan di sini tidak dalam arti material sebagaimana dipahami oleh kelompok *marxian* (materialisme dialektik), melainkan dapat bersumber dari kelas atau status sosial tertentu berupa otoritas dan sejenisnya. Max Weber mengelompokkan konsep kekuasaan ke dalam tiga jenis, yakni kekuasaan formal, kekuasaan tradisional, dan kekuasaan karismatik. Masuk dalam kategori kekuasaan tradisional dan karismatik ini adalah kekuasaan yang diperoleh melalui nilai-nilai keagamaan, sebagaimana ada dan melekat dalam diri kyai (Blau 1963; Spencer 1970). Dalam konteks kajian ini, unsur kekuasaan dalam diri kyai tergambar secara jelas dan nyata dari tingginya status sosial dirinya di kalangan masyarakat Madura. Begitu besar kedudukan dan pengaruh keagamaan sosok kiai dalam kehidupan masyarakat Madura, sehingga dirinya diidentifikasi oleh sebagian kalangan sebagai Raja Kecil (Abdullah 2007, 47). Sebagai seorang raja, artinya kyai memiliki kekuatan dan perangkat kekuasaan cukup lengkap untuk mengontrol dan mengkondisikan berbagai isu-isu sosial yang berkembang ada di lingkungannya. Tidak terkecuali isu-isu sosial keagamaan yang ada hubungannya dengan konflik dan semacamnya.

Selain kekuasaan, modal sosial kyai berikutnya adalah unsur pengetahuan. Unsur pengetahuan dalam kajian ini bukan dalam sudut pandang pengertian klasiknya, bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang tergambar dalam pemikiran berdasarkan hasil pencernaan dan pengamatan panca indra. Maksud makna pengetahuan di sini lebih merujuk pada rangkaian diskursus sosial yang keberadaannya selalu dibangun dan dikonstruksi unsur-unsur kekuasaan (Adian 2002). Oleh karenanya, dalam pandangan Michel Foucault, antara kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan, masing-masing saling berhubungan dan berkelindan. Jika kekuasaan dapat memproduksi dan

menghasilkan kebenaran, maka pengetahuan adalah legitimasi di mana praktik-praktik kekuasaan itu menjadi benar bahkan dibenarkan. Dalam konteks kajian ini, unsur pengetahuan dalam diri kyai merujuk pada nama dan peran sosialnya yang mengandung indeksikalitas makna tokoh keagamaan. Kiai bukan semata terminologi lokal yang memuat makna kelas sosial tertinggi di Madura selaku Raja Kecil—*Cultural Broker* dalam bahasa Clifford Geerts—namun lebih darinya, juga identik dengan figur daerah yang identik dengan wawasan dan pengetahuan agama mendalam. Itulah sebabnya, lazimnya masyarakat Madura di banyak kesempatan sering kali memosisikan kyai sebagai referensi tunggal dan sumber kebenaran dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang selama ini muncul di tengah masyarakat.

Terakhir, yaitu modal sosial berupa ideologi. Konsep ideologi di sini merujuk terhadap sistem berpikir diri yang menjadi petunjuk dan pedoman dalam menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Hal yang perlu digaris bawahi di sini, bahwa konsep ideologi tidak dalam arti mainstream seperti halnya kapitalisme, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Melainkan lebih kepada kelompok, paham atau aliran keagamaan tertentu semisal organisasi keislaman dan sejenisnya. Masuk dalam kategori ini yaitu ormas Islam Nahdlatul Ulama, selaku salah satu organisasi berpengaruh di Madura (Hannan 2017). Bagaimana memahami eksistensi organisasi Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari modal sosial kiai dalam sistem dan struktur sosial kehidupan masyarakat Madura? Jawabannya terletak pada hubungan simbiosis mutualisme yang selama ini terbangun dan terbentuk di antara kyai dan organisasi sosial keagamaan NU di Madura. Faktanya, mayoritas kiai di Madura memiliki ikatan emosional cukup kuat dengan NU, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, ikatan batin tersebut diikat oleh adanya afiliasi kelembagaan semisal menjadi pengurus aktif di dalam struktur NU, paling minimal adalah dirinya tercatat sebagai pimpinan pondok pesantren, di mana kita tahu NU adalah pesantren besar sementara pesantren adalah NU kecil (Hannan 2020). Adapun secara kultural, hubungan sosial (ideologi) NU dengan kiai di Madura dapat dilacak dari kuatnya pengaruh tradisi dan paradigma beragama NU dalam aktivitas sosial agama mereka sehari-hari, baik dalam hal pemikiran maupun ritual. Begitu kuatnya pengaruh NU dalam diri dan kultur beragama masyarakat Madura hingga ada anekdot lucu, ketika orang Madura ditanya agamanya apa, maka mereka akan menjawab 99 persen agamanya NU, dan 1 persennya adalah Muhammadiyah.

Dalam mengatasi kasus atau isu konflik sosial keagamaan di Madura. Keberadaan atau eksistensi kiai dalam sistem dan struktur sosial masyarakat Madura, yang selama ini

dinilai masyarakat setempat mempunyai modal sosial cukup kuat dan lengkap seperti halnya penguasaan dirinya terhadap perangkat kekuasaan, unsur pengetahuan (keagamaan), dan perangkat ideologis NU, ketiganya dapat menjadi instrumen strategis dalam upaya menangani dan menyelesaikan konflik keagamaan di Madura (Zainuddin and Hanan 2020). Berbekal ketiga modal sosial itu pula, cukup logis kiranya jika dalam kajian ini peneliti memosisikan level dan pengaruh kyai sebagai pihak atau kelompok tersier, yakni subjek tidak berkepentingan paling representatif dan ideal menjalankan aktivitas intervensi konflik keagamaan. Berdasarkan kedudukan dan pengaruhnya tersebut, kyai dengan segala karismatik dan ketokohnya dapat menjadi penengah, melakukan fungsi intervensi konflik dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik. Melalui kehadiran kyai sebagai mediator ada harapan segala bentuk pertentangan keagamaan yang selama ini muncul di kalangan masyarakat Madura dapat tertangani dan teratasi dengan baik, menghasilkan solusi dan resolusi konflik yang sepenuhnya berorientasi pada terwujudnya kedamaian, keadilan, objektivitas, dan ketenteraman.

Hal yang perlu dipertegas dan diperhatikan di sini, bahwa sebagai pihak penengah atau mediator dalam bahasa Galtung, kyai harus menjalankan aktivitas intervensinya dalam melerai dan menengahi konflik keagamaan di Madura dengan menjunjung tinggi netralitas. Dalam pengertian, kyai perlu menampung dan merangkul setiap kepentingan pihak berkonflik, sehingga dengannya dapat tercipta hubungan konflik yang konstruktif dan produktif. Sebaliknya, jika intervensi konflik yang dilakukan oleh kyai sebagai pihak mediator tidak bersikap netral dan objektif, sebaliknya memiliki kecenderungan membela atau berpihak pada salah satu kubu berkonflik, maka konflik keagamaan tidak akan terselesaikan. Kalaupun terselesaikan, keputusan yang diperoleh cenderung berorientasi pada pemenuhan satu kelompok keagamaan saja.

Kesimpulan

Berdasarkan pembacaan di atas, terdapat beberapa poin pokok yang menjadi kesimpulan kajian ini, yaitu: *Pertama*, bahwa konflik keagamaan di Madura menjadi salah satu persoalan sosial krusial yang terus berulang dari waktu ke waktu. Demikian tergambar jelas dari banyaknya kasus keagamaan yang terjadi dalam satu dekade terakhir, khususnya sejak pecahnya konflik berdarah antara muslim Sunni dan Syiah di Sampang. Dalam rangka menyikapi dan merespons situasi sosial yang tidak kondusif ini, perlu adanya langkah-langkah mitigasi khusus guna menekan konflik seminim mungkin, menangani dan menyelesaikan konflik dengan cara dan pendekatan yang tidak saja strategis namun juga efektif. Salah satu pendekatan atau strategi yang bisa digunakan adalah dengan

memanfaatkan nilai kearifan lokal Madura. Konsep kearifan lokal di sini merujuk pada keberadaan atau kehadiran elit lokal Madura yang dipercaya memiliki kedudukan dan pengaruh cukup tinggi di kalangan masyarakat setempat. Dalam konteks kehidupan masyarakat Madura, elit lokal dimaksud mengacu pada keberadaan sosok kiai. *Kedua*, klaim bahwa kyai merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Madura yang dipandang strategis menangani dan menyelesaikan konflik keagamaan di Madura didasarkan pada fakta, bahwa kyai memiliki modal sosial cukup lengkap untuk dapat melakukan intervensi konflik keagamaan. Mengacu pada status dan peran sosial dirinya selama ini, modal sosial diri kyai mencakup tiga unsur, yakni unsur kekuasaan, unsur pengetahuan, dan unsur ideologis. Unsur kekuasaan dalam diri kyai merujuk pada status sosial dirinya, di mana kyai selama ini identik sebagai sosok Raja Kecil yang dapat mengkondisikan masyarakat di sekitarnya. Unsur pengetahuan mengacu pada makna populer kyai sebagai figur lokal yang dipercaya masyarakat Madura memiliki pemahaman dan wawasan keagamaan mendalam dan luas. Adapun unsur ideologi merujuk pada eksistensi beragama kyai yang selama ini dikenal memiliki ikatan emosional cukup dekat dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, baik ikatan secara struktural maupun ikatan secara tradisional.

Referensi

- Abdullah, Said. (2007). *Pesantren, Jati Diri Dan Pencerahan Masyarakat*. I. I. Sumenep: Said Abdullah Institute Publishing.
- Abidin, Ahmad Zainal. (2018). 'Between Conflict and Peace: The Government Policies and Sunni-Shia Relationship in Sampang and Yogyakarta'. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. 19 (2). <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1594>.
- Adian, Dony Gahril. (2002). *Percik Pemikiran Kontemporer*. I. 1. Yogyakarta: Jalasutra.
- Afdillah, Muhammad. (2016). *Dari Masjid Ke Panggung Politik: Melacak Akar-Akar Kekerasan Agama Antara Komunitas Sunni Dan Syiah Di Sampang, Jawa Timur*. 1st ed. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada.
- Afiqoh, Noviana, Hamdan Tri Atmaja, and Ufi Saraswati. n.d. 'Penanaman Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Sejarah Pokok Bahasan Perkembangan Islam di Indonesia Pada Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 1 Pamotan Tahun Ajaran 2017/2018', 12.
- Agency, ANTARA News. (2023). 'Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang Terkait Laporan Ujaran Kebencian'. ANTARA News Jawa Timur. 31 January 2023.

- <https://jatim.antaranews.com/berita/676290/polres-pamekasan-periksa-tiga-orang-terkait-laporan-ujaran-kebencian>.
- A'la, Abd, and Ahwan Mukarrom. (2020). 'Power-Knowledge Relations of the Elder and the Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura: A Counter-Narrative'. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 10(1).
- A'la, Abd, Ahwan Mukarrom, and Mukhammad Zamzami. (2018). 'Kontribusi Aliansi Ulama Madura (AUMA) dalam Merespons Isu Keislaman dan Keumatan di Pamekasan Madura'. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*. 8(2). <https://doi.org/10.15642/religio.v8i2.793>.
- AMAN Indonesia. (2012). 'Dilema Kebebebasan Beragama Di Indonesia: Studi Kasus Pembakaran Rumah Ibadah Di Sampang Madura'.
- Blau, Peter M. (1963). 'Critical Remarks on Weber's Theory of Authority'. *American Political Science Review*. 57 (2). <https://doi.org/10.2307/1952824>.
- Daniah, Daniah. (2016). 'Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter'. *Pioner: Jurnal Pendidikan*. 5 (2).
- De Jonge, Huub. (1989). *Agama, Kebudayaan, Dan Ekonomi: Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Jakarta: Rajawali Press.
- Efendi, Supyanto. (2023). 'Kasus Yasir Hasan Tak Tuntas, Kinerja Polres Pamekasan Disorot Tokoh NU'. *LingkarJatim* (blog). 14 March 2023. <https://lingkarjatim.com/uncategorized/kasus-yasir-hasan-tak-tuntas-kinerja-polres-pamekasan-disorot-tokoh-nu/>.
- Ferdian, Kuswanto. (2023). 'Masjid di Pamekasan Disegel Ribuan Warga, Ceramah Ustaz Yazir Hasan Jadi Pemantik'. *Tribunjatim.com*. 25 January 2023. <https://jatim.tribunnews.com/2023/01/25/masjid-di-pamekasan-disegel-ribuan-warga-ceramah-ustaz-yazir-hasan-jadi-pemantik>.
- Foucault, Michel. (1961). *Madness and Civilization*. French: Librairie Plon. <https://doi.org/10.4324/9780203164693>.
- Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hamdi, Ahmad. 2014. 'Klaim Religious Authority Dalam Konflik Sunni-Syi'i Sampang Madura'. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. 6 (1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.215-231>.
- Hannan, Abd. (2017). 'Fanatisme Komunitas Pesantren NU Miftahul Ulum Dan Stigma Sosial Pada Muhammadiyah Di Kabupaten Pamekasan'. Surabaya: Universitas Airlangga.

- . (2020). 'Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren'. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. 13 (2) <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168>.
- Hannan, Abd, and Kudrat Abdillah. (2019). 'Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial; Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura'. *Jurnal Sosial Budaya*. 16 (2).
- Ida, Rachmah, and Laurentius Dyson. (2015). 'Konflik Sunni-Syiah dan dampaknya terhadap komunikasi intra- religius pada komunitas di Sampang-Madura'. 28 (1)
- Iik, Mansurnoor. (1990). *Islam in an Indonesian World; Ulama of Madura*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Izzati, Afina. (2020). 'Kiai Sebagai Figur Toleransi Kearifan Lokal di Lasem'. *FIKRAH*. 8 (2) <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.8005>.
- Kartika, Hentty. (2023). 'Ribuan Warga NU di Madura, Tuntut Ustad Yasir Penganut Ajaran Wahabi Ditangkap'. 31 January 2023. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/97700-ribuan-warga-nu-di-madura-tuntut-ustad-yasir-penganut-ajaran-wahabi-ditangkap>.
- KONTRAS Surabaya. (2012). 'Laporan Investigasi Dan Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang'. KONTRAS Surabaya.
- Kuntowijoyo, Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Jogyakarta: Mata Bangsa.
- Musthofa, Muhammad Wakhid, and Mohamad Yusup. (2021). 'A Solution to the Sunni and Shia Conflict in Sampang Madura Using a Dynamic Game Theory'. *Dialogia*. 19 (2)
- Nasrullah, Nasrullah. (2019). 'Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam dan Kearifan Lokal Budaya Madura'. *Al-Irfan* 2 (2)
- Njatrijani, Rinitami. (2018). 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang'. *Gema Keadilan* 5 (1)
- Rachman, Taufik. (2012). 'Ini Kronologi Bentrok Sampang Versi BASSRA'. Republika Online. 27 August 2012. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/27/m9eyb6-ini-kronologi-bentrok-sampang-versi-bassra>.

- Rahman, Ahmad. (2023). 'Pelaku Pembakaran Kantor MWC NU Sumenep Tertangkap'. detikjatim. Mei 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6717411/pelaku-pembakaran-kantor-mwc-nu-sumenep-tertangkap>.
- Rozaki, Abdur. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai Dan Blater Sebagai Rezim Kembar Di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Salam, Moh. Ishaq Abd. (2015). 'Reproduksi Kekuasaan Kyai; Penggunaan Sarana Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemilukada Bangkalan'. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. <http://repository.unair.ac.id/38789/>.
- Sartini. (2004). 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati'. *Jurnal Filsafat*, 37 (2)
- Spencer, Martin E. (1970). 'Weber on Legitimate Norms and Authority'. *The British Journal of Sociology* 21 (2). <https://doi.org/10.2307/588403>.
- Zainuddin, Syarif, and Abd Hanan. (2020). 'Kearifan Lokal Pesantren Sebagai Bangunan Ideal Moderasi Islam Masyarakat Madura'. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. 14 (2)